

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi 61,1% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja Nasional dalam perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menempatkan UMKM sebagai tulang punggung sistem ekonomi nasional yang berkontribusi terhadap berbagai aspek pembangunan ekonomi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam UU No. 20 Tahun 2008, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha yang memiliki aset maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau omzet tahunan maksimal Rp300 juta. Usaha kecil memiliki aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta atau omzet tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sementara usaha menengah didefinisikan sebagai usaha dengan

aset antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar atau omzet tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Dalam konteks perekonomian Indonesia, UMKM memegang peran yang sangat strategis dan vital. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM berkontribusi sebesar 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja yang ada. Kontribusi yang sangat besar ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat Indonesia. Ketahanan UMKM terbukti saat krisis ekonomi 1998 dan pandemi COVID-19, di mana UMKM mampu bertahan dan beradaptasi lebih baik dibandingkan usaha besar karena memiliki fleksibilitas tinggi, biaya operasional yang lebih rendah, dan ketergantungan yang minimal terhadap bahan baku impor (Tambunan, 2020; Rahmawati & Kusuma, 2021).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), UMKM memiliki karakteristik yang khas dengan keragaman sektor usaha yang tinggi, mulai dari kerajinan tradisional (batik, keramik, perak), kuliner khas daerah, industri kreatif berbasis seni dan budaya, hingga jasa berbasis teknologi digital. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY tahun 2024, kontribusi UMKM terhadap PDRB DIY mencapai 58% pada tahun 2023, menunjukkan dominasi sektor UMKM dalam struktur ekonomi daerah. Keberagaman ini mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang didukung oleh potensi wisata yang kuat, kekayaan warisan budaya yang tinggi, serta ekosistem pendidikan yang berkualitas dengan keberadaan puluhan universitas ternama (BPS DIY, 2024).

Kabupaten Sleman memiliki posisi geografis dan ekonomi yang sangat strategis dalam konstelasi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak di sebelah utara Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 574,82 km², Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kapanewon (kecamatan) dengan total penduduk sekitar 1,2 juta jiwa pada tahun 2024. Secara ekonomi, Kabupaten Sleman merupakan kontributor terbesar terhadap ekonomi DIY dengan PDRB mencapai Rp65,81 triliun pada tahun 2023 atas dasar harga berlaku, menyumbang sekitar 35% dari total PDRB DIY (BPS Kabupaten Sleman, 2024). Struktur ekonomi Sleman didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran (22%), jasa pendidikan (18%), industri pengolahan (15%), konstruksi (12%), serta pertanian (8%). Yang menjadi keunikan Kabupaten Sleman adalah keberadaan kawasan pendidikan tinggi yang sangat masif dengan lebih dari 100.000 mahasiswa, menciptakan ekosistem ekonomi yang unik terutama untuk UMKM di sektor kuliner, jasa, dan industri kreatif (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, 2024).

Jumlah UMKM Provinsi DIY Per Kabupaten 2021-2024		
No	Kabupaten	Jumlah
1	Kabupaten Sleman	373.846
2	Kabupaten Bantul	363.218
3	Gunungkidul	225.956
4	Kota Yogyakarta	153.812
5	Kulon Progo	97.037

Tabel 1.1.1 Data Jumlah UMKM Provinsi DIY 2021-2024

Tabel 1.1.1 menyajikan data jumlah UMKM di lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengungkapkan distribusi yang sangat tidak merata antar wilayah. Kabupaten Sleman mendominasi dengan jumlah UMKM

sebanyak 373.846 unit atau sekitar 30,6% dari total UMKM di DIY, mengungguli Kabupaten Bantul yang memiliki 363.218 unit (29,8%), Kabupaten Gunungkidul 225.956 unit (18,5%), Kota Yogyakarta 153.812 unit (12,6%), dan Kabupaten Kulon Progo 97.037 unit (7,9%). Dominasi kuantitatif Sleman ini mencerminkan basis *entrepreneurial* yang sangat kuat, didukung oleh beberapa faktor kunci: pertama, lokasi geografis yang strategis sebagai wilayah suburban yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah Jawa Tengah; kedua, ekosistem pendidikan tinggi yang masif dengan keberadaan lebih dari 30 perguruan tinggi termasuk Universitas Gadjah Mada, UPN Veteran Yogyakarta, UIL, dan ISI Yogyakarta yang menciptakan pasar konsumen yang besar dan mendorong proliferasi UMKM berbasis pengetahuan; ketiga, diversifikasi ekonomi yang tinggi dengan keseimbangan antara sektor pertanian, industri, dan jasa yang menciptakan peluang kewirausahaan di berbagai sektor (BPS DIY, 2024).

Meskipun Sleman hanya sedikit lebih unggul dari Bantul dalam hal kuantitas UMKM (selisih hanya 10.628 unit atau 2,9%), terdapat perbedaan struktural yang signifikan dalam karakteristik UMKM kedua kabupaten. UMKM di Sleman cenderung terkonsentrasi di sektor jasa modern, perdagangan ritel, industri kreatif, dan teknologi informasi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, sementara UMKM di Bantul lebih didominasi oleh sektor kerajinan tradisional, pertanian, dan home industry dengan margin keuntungan yang lebih rendah (Dinas Koperasi dan UKM DIY, 2024). Perbedaan ini berimplikasi pada produktivitas dan kinerja ekonomi UMKM, di mana

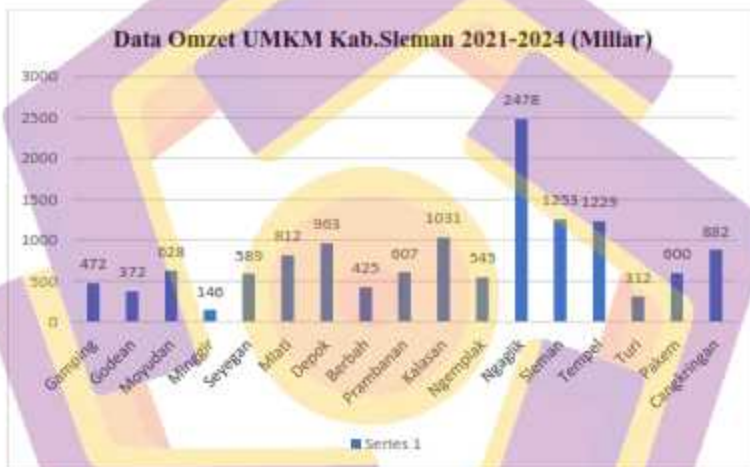
meskipun jumlah unit hampir sama, omzet dan kontribusi terhadap PDRB dapat sangat berbeda. Fenomena ini sejalan dengan teori structural transformation (Kuznets, 1971; Chenery, 1979) yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kuantitas unit usaha, tetapi lebih penting lagi oleh transformasi dari sektor tradisional dengan produktivitas rendah ke sektor modern dengan produktivitas tinggi.

Pemilihan Kabupaten Sleman sebagai lokus penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Sleman memiliki jumlah UMKM terbanyak di DIY sehingga memberikan sample yang memadai untuk analisis statistik. Sleman juga memiliki karakteristik UMKM yang sangat tinggi, mulai dari UMKM mikro berbasis keluarga di wilayah hingga UMKM menengah, memberikan variasi yang cukup untuk analisis faktor-faktor determinan kinerja. Sleman memiliki data UMKM yang relatif lebih lengkap dan terstruktur dibandingkan kabupaten lain, memfasilitasi penelitian yang berkualitas. Sleman menunjukkan tingkat ketimpangan kinerja UMKM antar-kecamatan yang sangat tinggi, menciptakan urgensi untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan disparitas tersebut sebagai dasar perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Omzet adalah total nilai penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh UMKM dalam periode satu tahun kalender sebelum dikurangi biaya-biaya operasional (Kasmir, 2019). Omzet mencerminkan kemampuan UMKM dalam menghasilkan pendapatan kotor dan menjadi indikator utama kinerja ekonomi usaha. Dalam penelitian ini, omzet digunakan sebagai proksi kinerja UMKM

karena lebih mudah diukur dan lebih objektif dibandingkan laba bersih yang sangat dipengaruhi oleh metode akuntansi biaya.

Data empat indikator utama UMKM di Kabupaten Sleman tahun 2021-2024 yang dipublikasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman (2024) memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi UMKM di tingkat lokal.



Gambar 1. 1.2 Data Omzet UMKM Kabupaten Sleman 2021-2024

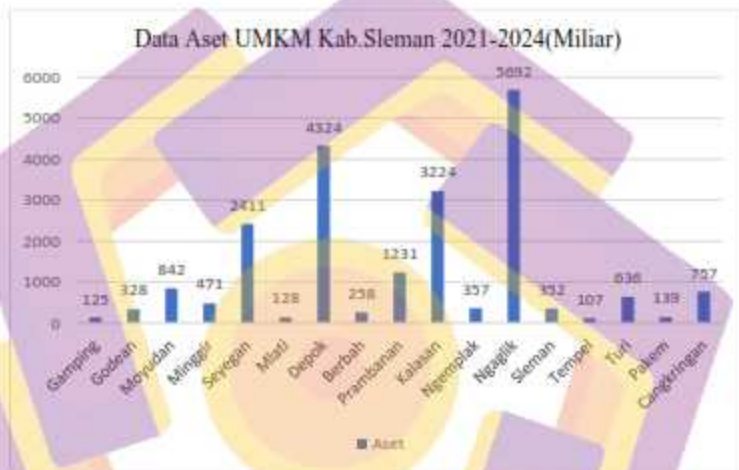
Gambar 1.1.2 menyajikan data Omzet UMKM di Kabupaten Sleman untuk periode 2021-2024, mengungkapkan kesenjangan yang sangat tinggi antar wilayah. Terdapat kesenjangan yang sangat ekstrem di mana Kecamatan Ngaglik mencatatkan omzet agregat tertinggi sebesar Rp2.4 triliun selama periode empat tahun, diikuti oleh Sleman (Rp1.2 triliun), Tempel (Rp1.2 triliun), Kalasan (Rp1.03 triliun), dan Depok (Rp963 miliar). Di sisi lainnya, Kecamatan Minggir hanya mencatatkan omzet Rp146 miliar, menciptakan

rasio disparitas 17:1 antara kecamatan tertinggi dan terendah. Kecamatan Ngaglik sendiri menyumbang sekitar 19,3% dari total omzet agregat Kabupaten Sleman, sementara lima kecamatan terendah (Minggir, Turi, Godean, Berbah, dan Ngemplak) secara gabungan hanya menyumbang sekitar 14,5%. Konsentrasi ekonomi yang sangat tinggi ini mencerminkan pola di mana kesuksesan awal suatu wilayah menciptakan eksternalitas positif yang menarik lebih banyak investasi, modal, dan tenaga kerja terampil, semakin memperlebar kesenjangan dengan wilayah lain (Myrdal, 1957).

Kesenjangan omzet ini dapat dijelaskan melalui Teori Fungsi Produksi Cobb-Douglas yang menekankan bahwa output (dalam hal ini omzet) merupakan fungsi dari kombinasi input produksi yaitu modal (diproksikan dengan aset) dan tenaga kerja, serta faktor efisiensi teknologi yang tercermin dalam *Total Factor Productivity* (TFP). Solow (1957) menjelaskan bahwa pertumbuhan output tidak semata-mata berasal dari penambahan modal fisik atau tenaga kerja, melainkan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, inovasi, dan kualitas manajemen. Sleman memiliki 39.947 unit dengan omzet Rp1.253 triliun sedangkan Moyudan memiliki 34.852 unit namun omzet hanya Rp628 miliar—mengindikasikan bahwa faktor TFP atau efisiensi penggunaan input produksi memainkan peran yang sangat krusial dalam menentukan kinerja ekonomi UMKM.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK, 2018), Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan

diharapkan akan diperoleh entitas. Dalam konteks UMKM, aset mencakup semua sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh usaha yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Secara detail, data Aset UMKM per kecamatan di Kabupaten Sleman periode 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar1. 2 Data Aset UMKM Kabupaten Sleman 2021-2024

Kesenjangan aset menunjukkan pola yang bahkan lebih ekstrem. Kecamatan Ngaglik memiliki akumulasi aset sebesar Rp32.692 miliar atau sekitar 61,4% dari total aset UMKM Kabupaten Sleman, menciptakan dominasi yang sangat tidak proporsional. Aset Ngaglik mencapai 695 kali lipat lebih besar dari Minggir yang hanya Rp47 miliar, dan 389 kali lipat dari Moyudan yang Rp84 miliar. Depok dengan aset Rp12.324 miliar, namun masih jauh tertinggal dari Ngaglik. Konsentrasi aset yang sangat ekstrem ini mengindikasikan bahwa Ngaglik menjadi lokasi preferensi bagi UMKM

menengah-besar dengan Industri padat modal, kemungkinan di sektor properti, konstruksi, manufaktur, dan jasa profesional yang memerlukan investasi modal yang besar.

Fenomena ini sejalan dengan Teori New Economic Geography yang dikembangkan oleh Krugman (1991), yang menjelaskan bahwa dalam kondisi increasing returns to scale dan biaya transportasi yang heterogen, aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi di lokasi-lokasi tertentu yang memiliki keunggulan aglomerasi. Dalam konteks Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngaglik yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta dan terletak di jalur strategis Jalan Kaliurang memiliki keuntungan lokasional yang sangat besar. Menarik investasi besar dalam bentuk hotel, restoran, mall, showroom otomotif, pusat-pusat bisnis modern, dan properti komersial yang semuanya memerlukan akumulasi aset yang sangat besar. Hal yang sama terlihat di Depok yang menjadi kawasan pendidikan dengan didominasi kos-kosan, apartemen, pusat perbelanjaan, dan fasilitas komersial yang melayani lebih dari 100.000 mahasiswa, serta di Kalasan dan Seyegan yang mengalami perkembangan properti residensial dan komersial yang signifikan.

Teori Fungsi Produksi Cobb-Douglas menekankan bahwa keberhasilan produksi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya modal atau aset, tetapi juga oleh efisiensi dalam mengelola seluruh input produksi. Solow (1957) menjelaskan bahwa pertumbuhan output tidak semata-mata berasal dari penambahan modal, melainkan sangat dipengaruhi oleh *Total Factor Productivity* (TFP), yang mencerminkan kemampuan mengelola input

produksi seperti kemajuan teknologi, inovasi, dan kualitas manajemen. Dalam konteks UMKM di Sleman, rendahnya TFP pada kecamatan yang memiliki aset besar dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, aset tersebut belum dikelola secara optimal dan tidak digunakan untuk operasional produktif, terdapat fenomena spekulasi properti di mana pelaku usaha membeli tanah dan bangunan sebagai instrumen investasi akibat kenaikan harga properti yang pesat di kawasan perbatasan Kota Yogyakarta, namun aset tersebut tidak menghasilkan revenue operasional, dan terdapat over-investment pada aset yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau kapasitas manajerial pelaku usaha, sehingga menciptakan beban biaya tetap yang tinggi tanpa menghasilkan revenue yang memadai.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang tidak kalah penting dari aset dalam menentukan kinerja UMKM. Teori human capital yang dikembangkan oleh Gary Becker (1964) dan Theodore Schultz (1961) menekankan bahwa tenaga kerja bukan hanya input produksi pasif, melainkan aset yang dapat ditingkatkan nilainya melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Data penyerapan Tenaga Kerja UMKM per kecamatan di Kabupaten Sleman periode 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar1. 3 Data Tenaga Kerja UMKM Kabupaten Sleman 2021-2024

Gambar di atas menunjukkan pola penyerapan tenaga kerja menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda dengan omzet dan aset, mencerminkan variasi model bisnis UMKM antar kecamatan. Kecamatan Depok mendominasi dengan menyerap 233.682 tenaga kerja atau sekitar 30,8% dari total tenaga kerja UMKM Sleman, jauh melampaui Gamping (138.899 orang), Mlati (71.204 orang), Kalasan (65.906 orang), dan Ngemplak (56.832 orang). Yang menarik, Depok menyerap tenaga kerja 9,2 kali lebih banyak dari Ngaglik meskipun omzet Depok hanya 39% dari Ngaglik dan aset hanya 37,7% dari Ngaglik.

Kesenjangan ini mengindikasikan perbedaan fundamental dalam padat faktor produksi, UMKM di Depok cenderung produktivitas per pekerja lebih rendah (seperti warung makan, jasa fotokopi, retail kecil, laundry), sementara UMKM di Ngaglik cenderung produktivitas per pekerja lebih tinggi (seperti

manufaktur, konstruksi, jasa profesional). Hal ini sesuai dengan teori dual economy (Lewis, 1954) yang membagi perekonomian menjadi sektor modern dengan modal dan upah tinggi, serta sektor tradisional dengan modal dan upah yang lebih rendah.

Ketersediaan tenaga kerja berkualitas di Kabupaten Sleman juga sangat dipengaruhi oleh konsentrasi perguruan tinggi yang sangat masif. Dengan lebih dari 30 kampus dan lebih dari 100.000 mahasiswa aktif, Sleman memiliki labor market pooling yang sangat kuat untuk tenaga kerja muda dan terdidik. Keberadaan populasi mahasiswa yang besar ini menciptakan dua fenomena sekaligus yang saling terkait. Pertama, menyediakan supply tenaga kerja part-time yang fleksibel, relatif terampil, dan berbiaya rendah bagi UMKM di sektor jasa dan retail—hal ini menjelaskan mengapa Depok, Mlati, dan Gamping yang merupakan kawasan konsentrasi kampus memiliki penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Kedua, menciptakan demand pasar yang besar bagi UMKM di sektor kuliner, fotokopi, laundry, kos-kosan, transportasi, dan berbagai jasa pendukung kehidupan mahasiswa, yang pada gilirannya menciptakan kebutuhan untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja untuk melayani pasar tersebut. Fenomena ini sejalan dengan teori agglomerasi ekonomi Marshall (1890) yang mengidentifikasi labor market pooling—ketersediaan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar di suatu wilayah—sebagai salah satu sumber eksternalitas positif dari konsentrasi geografis aktivitas ekonomi. Konsentrasi UMKM di kawasan kampus menciptakan thick labor market yang memudahkan matching antara employer dan pekerja, mengurangi search cost

untuk rekrutmen, serta memfasilitasi knowledge spillovers melalui mobilitas pekerja antar UMKM.

Persaingan yang sangat ketat dapat memicu perang harga yang merugikan semua pelaku usaha, menurunkan margin keuntungan dan mengurangi kemampuan untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha. Berikut data Jumlah unit UMKM per kecamatan di Kabupaten Sleman periode 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 1. 4 Data Jumlah Unit UMKM di Kabupaten Sleman 2021-2024

Gambar 1.4 menunjukkan Jumlah unit UMKM menunjukkan distribusi yang relatif lebih merata dibandingkan variabel lain. Kecamatan Sleman memiliki jumlah unit terbanyak dengan 39.947 unit, diikuti Moyudan (34.852 unit), Prambanan (30.319 unit), Depok (30.229 unit), dan Minggir (28.076 unit). Di sisi terendah adalah Ngemplak dengan 10.010 unit. Rasio antara tertinggi dan terendah hanya 4:1, jauh lebih kecil dibandingkan rasio omzet

(17:1) dan aset (695:1). Distribusi yang lebih merata ini mengindikasikan bahwa demokratisasi kewirausahaan terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Sleman, di mana hambatan untuk mendirikan UMKM mikro relatif rendah. Namun, kesenjangan yang sangat besar dalam omzet dan aset meskipun jumlah unit relatif merata menunjukkan bahwa perbedaan utama terletak pada skala, produktivitas, dan value-added per unit usaha, bukan pada jumlah unit semata. Fenomena ini menekankan pentingnya fokus kebijakan pada produktivitas dibandingkan hanya jumlah unit.

Teori agglomerasi ekonomi yang dikembangkan oleh Alfred Marshall (1890) dan diperluas oleh ekonom modern seperti Paul Krugman (1991) menjelaskan bahwa konsentrasi geografis aktivitas ekonomi menciptakan eksternalitas positif yang meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan yang berlokasi di wilayah tersebut. Marshall mengidentifikasi tiga sumber utama eksternalitas aglomerasi: ketersediaan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar, berbagi akses terhadap pemasok dan pertukaran pengetahuan dan teknologi melalui interaksi informal (Marshall, 1890).

Dalam konteks Kabupaten Sleman, mekanisme aglomerasi ini dapat diamati dengan jelas di beberapa kawasan yang telah membentuk kluster UMKM dengan karakteristik spesifik. Di sepanjang Jalan Kaliurang yang menghubungkan Ngaglik hingga Pakem, konsentrasi UMKM kuliner dan retail membentuk kawasan belanja dan kuliner yang menjadi destinasi pengunjung dari berbagai wilayah DIY dan Jawa Tengah. Data menunjukkan bahwa Ngaglik (17.056 unit), Pakem (26.364 unit), dan Cangkringan (15.660 unit)

yang berada di koridor ini memiliki karakteristik UMKM yang berbeda dari kecamatan lain—lebih banyak bergerak di sektor hospitality, kuliner premium, dan retail modern. Ketika jumlah usaha di kawasan ini bertambah, area tersebut semakin dikenal sebagai destination, menarik lebih banyak calon pelanggan dan menciptakan positive feedback loop. Setiap UMKM baru yang berdiri tidak hanya menghasilkan omzet dari pelanggannya sendiri, tetapi juga meningkatkan traffic pengunjung ke kawasan yang menguntungkan UMKM yang sudah ada sebelumnya melalui spillover demand.

Di kawasan kampus Depok (30.229 unit), Mlati (22.631 unit), dan Gamping (18.517 unit), proliferasi warung makan, fotokopi, laundry, dan retail menciptakan ekosistem yang saling mendukung, di mana keberadaan satu usaha meningkatkan viability usaha lainnya melalui peningkatan foot traffic, customer base yang lebih besar, dan terciptanya one-stop destination bagi mahasiswa. Mekanisme agglomerasi ini menjelaskan mengapa penambahan satu unit UMKM di kawasan yang sudah padat tidak hanya menambah output unit tersebut, tetapi juga meningkatkan produktivitas UMKM yang sudah ada melalui eksternalitas positif, menciptakan increasing returns to density sebagaimana diprediksi oleh teori New Economic Geography.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Omzet UMKM di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dan data yang ditampilkan, diperlukan

berbagai pemecahan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh Aset terhadap omzet UMKM di Kabupaten Sleman tahun 2021-2024?
- 2) Bagaimana Pengaruh Tenaga Kerja terhadap omzet UMKM di Kabupaten Sleman tahun 2021-2024?
- 3) Bagaimana Pengaruh Jumlah Unit UMKM terhadap omzet UMKM di Kabupaten Sleman tahun 2021-2024?
- 4) Bagaimana pengaruh aset, tenaga kerja, dan jumlah unit UMKM secara simultan terhadap omzet UMKM di Kabupaten Sleman tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor produksi terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sleman tahun 2021-2024. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur besarnya pengaruh aset terhadap omzet UMKM di Kabupaten Sleman, sehingga dapat diketahui seberapa signifikan peranan akumulasi modal usaha dalam meningkatkan kinerja finansial UMKM di masing-masing kecamatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengukur besarnya pengaruh tenaga kerja terhadap omzet UMKM, guna memahami kontribusi sumber daya manusia sebagai faktor produksi dalam meningkatkan kapasitas operasional dan capaian omzet usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur besarnya pengaruh jumlah unit UMKM terhadap omzet UMKM di Kabupaten Sleman, dengan tujuan mengidentifikasi apakah konsentrasi unit usaha dalam suatu wilayah memberikan efek positif melalui mekanisme aglomerasi ekonomi atau justru menciptakan persaingan yang dapat mengurangi omzet individual pelaku usaha. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh simultan dari ketiga variabel independen—aset, tenaga kerja, dan jumlah unit UMKM—terhadap omzet UMKM secara bersama-sama, sehingga dapat diketahui kekuatan hubungan kolektif variabel-variabel tersebut dalam menjelaskan variasi omzet UMKM antar-kecamatan di Kabupaten Sleman.

Penelitian juga ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang memiliki pengaruh paling dominan di antara aset, tenaga kerja, dan jumlah unit UMKM terhadap omzet UMKM, sehingga dapat ditentukan prioritas intervensi kebijakan yang paling efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja UMKM. Dari aspek praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya Dinas Koperasi dan UKM, dalam merancang strategi pemberdayaan UMKM yang tepat sasaran untuk mengurangi disparitas omzet antar-wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sleman. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dalam bidang ekonomi pembangunan daerah, khususnya terkait dengan analisis faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kinerja UMKM. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dan sumber literatur bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, serta dapat memperluas pemahaman tentang dinamika UMKM dalam konteks ekonomi regional. Kontribusi penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat validitas teori-teori ekonomi yang telah ada, seperti teori fungsi produksi Cobb-Douglas, teori modal manusia, dan teori aglomerasi ekonomi, khususnya dalam aplikasinya terhadap sektor UMKM di negara berkembang.

Dari perspektif praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian. Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pengusaha UMKM tentang pentingnya optimalisasi penggunaan aset dan pengelolaan tenaga kerja yang efektif dalam upaya meningkatkan omzet usaha mereka. Pemahaman tentang faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja usaha dapat membantu pelaku UMKM dalam mengambil keputusan strategis terkait alokasi sumber daya, investasi modal, rekrutmen tenaga kerja, serta strategi pengembangan usaha yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil

penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi UMKM di berbagai kecamatan, sehingga pelaku usaha dapat belajar dari praktik-praktik terbaik yang ada dan menerapkannya dalam konteks usaha masing-masing.

Bagi peneliti sendiri, pelaksanaan penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk pengalaman praktis dalam melakukan riset empiris menggunakan metode kuantitatif, khususnya analisis regresi data panel. Proses penelitian ini memperdalam pemahaman peneliti tentang metodologi penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, serta interpretasi hasil statistik dalam konteks fenomena ekonomi riil. Penelitian ini juga melatih kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan sosial-ekonomi, merumuskan kerangka teoretis, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi pengembangan kompetensi peneliti dalam bidang penelitian ekonomi dan kebijakan publik di masa mendatang.

Manfaat yang paling strategis dari penelitian ini adalah kontribusinya bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya Dinas Koperasi dan UKM, dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berbasis bukti empiris. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merancang program-program intervensi yang tepat sasaran, seperti program bantuan permodalan, pelatihan manajemen usaha, pendampingan teknis, serta pengembangan infrastruktur pendukung UMKM di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Identifikasi variabel yang paling dominan mempengaruhi omzet dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan

prioritas alokasi anggaran dan sumber daya yang terbatas secara lebih efisien. Selain itu, pemahaman tentang disparitas kinerja UMKM antar-kecamatan dapat mendorong pemerintah untuk merancang strategi pengembangan wilayah yang lebih inklusif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terdistribusi secara merata dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar-wilayah.

Lebih luas lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, dalam memahami dinamika UMKM di tingkat kabupaten/kota sebagai basis perumusan kebijakan nasional. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam evaluasi dan penyempurnaan program-program pemberdayaan UMKM yang telah berjalan, serta dalam penyusunan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik UMKM di berbagai daerah. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga dapat berkontribusi terhadap upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta pengurangan ketimpangan ekonomi antar-wilayah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.5 Sistematika Bab

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab yang saling berkaitan dan terintegrasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang spesifik namun tetap terhubung dengan bab-bab lainnya sehingga membentuk satu kesatuan penelitian yang utuh dan komprehensif. Sistematika penulisan dari Bab I hingga Bab V adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab yang pertama dalam laporan penelitian. Pada bab ini terdapat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, penelitian, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan bab yang memuat landasan teoretis dan empiris yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Bab ini disusun untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian, teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan pembanding.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan secara rinci dan sistematis tentang metode dan prosedur penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data guna menjawab rumusan masalah dan menguji

hipotesis penelitian. Bab ini disusun sedemikian rupa sehingga penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain yang tertarik dengan topik serupa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan bab inti yang menyajikan hasil analisis data dan pembahasan mendalam terhadap temuan penelitian. Bab ini disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan, serta menginterpretasikan hasil dalam konteks teoretis dan empiris.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis di masa yang akan datang.